



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. POLEWALI MANDAR



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



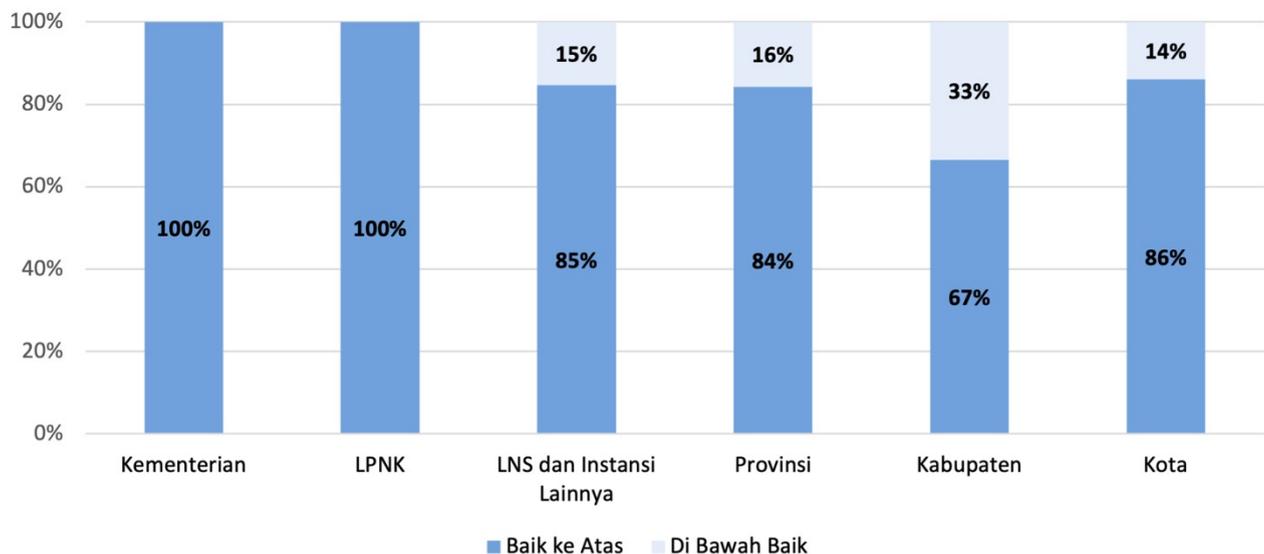
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

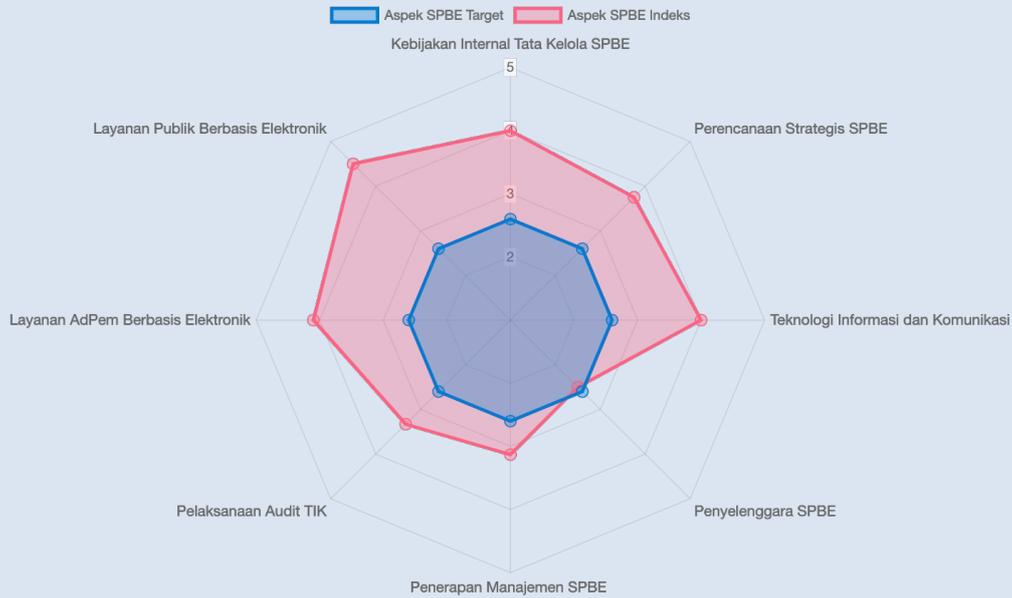
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,88
Domain Kebijakan SPBE	4,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>4,00</i>
Domain Tata Kelola SPBE	3,60
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>3,75</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>4,00</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>2,50</i>
Domain Manajemen SPBE	3,18
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>3,13</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>3,33</i>
Domain Layanan SPBE	4,26
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>4,10</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>4,50</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Jaringan Intra, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit SPBE, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah melakukan reviu terhadap seluruh Kebijakan Internal Tata Kelola yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE. Kebijakan Internal dibuktikan dengan adanya Perbup Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang SPBE, Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Optimilisasi Penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Reviu Penerapan SPBE 2023 dan rencana tindak lanjut SPBE Tahun 2024.
- **Kelemahan**
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya Tata Kelola Arsitektur SPBE, Tata Kelola Peta Rencana SPBE, Tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE, serta Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE. Perencanaan Strategis SPBE terdapat dalam Kebijakan Internal yang dibuktikan dengan adanya Perbup Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang SPBE, Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Optimilisasi Penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Reviu Penerapan SPBE 2023 tetapi belum melakukan pemutakhiran / belum terdapat upaya perbaikan berkelanjutan di tahun 2024 sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
- **Kelemahan**
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kelemahan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah melakukan reviu terhadap Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan tetapi belum melakukan perbaikan / peningkatan / belum terdapat upaya perbaikan berkelanjutan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
- **Kelemahan**
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE hanya satu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu indikator 20 - Tata Kelola Kolaborasi Penerapan SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan dan membentuk tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal, sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE secara terpadu seluruh unit kerja/perangkat daerah, sudah melakukan pertemuan secara rutin, dan melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE tetapi belum melakukan perbaikan pelaksanaan

Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.

- Kelemahan
Namun di sisi lain, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja secara ad-hoc dan tanpa ada perencanaan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah melakukan reviu secara berkala terhadap Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, dan Penerapan Manajemen Aset TIK.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih belum memenuhi seluruh kompetensi SDM SPBE, Penerapan Kompetensi SDM SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pedoman yang berlaku, pelaksanaan Manajemen Perubahan belum mengacu pada pedoman yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah, pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE hanya mencakup sebagian proses.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan.

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara rutin, dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Eksternal Tersertifikasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Keamanan SPBE.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kelemahan pada aspek Audit TIK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat terlihat adanya pengembangan Layanan Kepegawaian untuk aplikasi SIMPEG Polewali Mandar yang terintegrasi dengan Aplikasi SIASN (pengganti SAPK yang merupakan layanan pemerintah pusat) menjadi kekuatan dalam Layanan Administrasi Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Layanan-layanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar panduan teknis penggunaan aplikasi.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan beberapa Layanan Publik Sektoral.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektoral menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Layanan Publik Sektoral dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi.

- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kelemahan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

REKOMENDASI

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sudah dapat menggambarkan predikat SANGAT BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah :

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Keunggulan aspek layanan publik pada pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar yaitu telah digunakannya layanan publik yang bersifat tematik. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dibuktikan dengan adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektoral menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Layanan Publik Sektoral dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi. Keunggulan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik lainnya pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan adanya aplikasi pusat yang digunakan seperti SP4N LAPOR, SATU DATA, JDIH dan JDIHN yang telah melakukan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lain.

Kelemahan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah :

Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja secara ad-hoc dan tanpa ada perencanaan. Tim Koordinasi SPBE dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Berdasarkan tujuan dibentuknya Tim Koordinasi, maka dibutuhkan perencanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Saran Perbaikan :

1. Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.
2. Tim Koordinasi SPBE dilengkapi dengan dokumentasi. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE IPPD.
3. Melengkapi penerapan Kompetensi SDM SPBE yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE dan perencanaan kebutuhan SDM SPBE. Penerapan Kompetensi SDM SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
4. Melengkapi penerapan Manajemen Perubahan yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE. Penerapan Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Perubahan (KemenPANRB).
5. Melengkapi Peta Rencana SPBE yang masih berlaku yang didalamnya tertuang tentang Kompetensi SDM SPBE dan Manajemen Perubahan.
6. Melengkapi pedoman manajemen Layanan SPBE untuk pelaksanaan Manajemen Layanan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	4
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024